

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN UPAH MINIMUM REGIONAL
BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

(Studi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri)

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

FIRMAN WIDIA NANDA

NIM. 115010107113017



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN UPAH MINIMUM
REGIONAL BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

(Studi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri)

FIRMAN WIDIA NANDA, RACHMAD SAFA'AT

Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2015,

Email : Ananda_Firman99@yahoo.com

Abstrak

Dalam penulisan skripsi ini dibahas tentang peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan upah minimum regional bagi usaha kecil dan menengah. Permasalahan yang terjadi terkait dengan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan upah minimum regional bagi usaha kecil dan menengah adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri menyatakan masih terdapat 60 % pengusaha yang belum melaksanakan kebijakan upah minimum regional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, karena bertujuan untuk memahami dengan benar peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan upah minimum regional bagi usaha kecil dan menengah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis karena mengingat yang akan dianalisa terkait dengan peran Pemerintah Kota Kediri dalam melaksanakan kebijakan upah minimum regional. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan upah minimum berdasarkan adanya penetapan upah minimum regional yang sudah disahkan oleh Gubernur Jawa Timur kemudian disosialisasikan keseluruh perusahaan di wilayah Kota Kediri. Upaya selanjutnya yaitu dengan melaksanakan monitoring dan pengawasan secara rutin dengan cara terjun langsung kesetiap perusahaan. Bagi pengusaha yang tidak mampu melaksanakan kebijakan UMR dapat mengajukan penangguhan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tindakan pemerintah yaitu melakukan negosiasi antara pengusaha dan pekerja, kemudian membuat kesepakatan antara perusahaan dan buruh berkenaan dengan besarnya upah yang diterima buruh sehingga tidak ada buruh yang merasa dirugikan.

Kata kunci : Peran Pemerintah Daerah, Kebijakan Upah Minimum Regional, Usaha Kecil dan Menengah.

**ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN THE REGIONAL IMPLEMENTATION OF
MINIMUM WAGE FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**

(Studies in the Department of Social Welfare and Labor Kediri)

FIRMAN WIDIA NANDA, RACHMAD SAFA'AT

Civil Law, Faculty of Law, Brawijaya University, May 2015,

Email: Ananda_Firman99@yahoo.com

Abstract

This writing is discussed about implementation of the government's role in regional minimum wage for the small and medium enterprises. The problem that related to the local government's role in implementation of regional minimum wages for the small and medium- enterprises is social and labor department's statement that there are still 60 % entrepreneurs that do not implement the wisdom of regional minimum wages. This research is empirical Yuridis which the purpose is to know the right local government's role in implementation of regional minimum wages for the small and medium enterprises. The research was conducted using juridical sociological to analyzed the role of the Government of Kediri in implementation of regional minimum wages for the small and medium enterprises. The result of the research, the researcher obtained the answers that the implementation and supervision of the minimum wage based on the regional minimum wages have been endorsed by the Governor of East Java and then socialized throughout the company in the region of Kediri. For the next, the government has to do monitoring and supervision routinely into every company directly. To entrepreneurs who could not carry out the wisdom of UMR to propose the postponement according to the regulation of constitution. The government have to do negotiations between the entrepreneurs and labors, and make a deal between the company and the labors about the amount of payment, so that no labors who feel aggrieved.

Keywords: The Role of Local Government, The Wisdom of Regional Minimum Wage, The Small and Medium Enterprises

A. Latar Belakang

Bidang ketenagakerjaan Indonesia dari tahun-ketahun mengalami peningkatan, sedangkan untuk penawaran terhadap tenaga kerja justru tidak seimbang dengan jumlah tersedianya pekerjaan. Hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap hubungan industrial itu sendiri, khususnya dalam hal membela kepentingan pekerja yang dinilai dalam posisi lemah. , tetapi di sisi lain hubungan antara buruh dan pengusaha juga memiliki perbedaan dan bahkan potensi konflik, terutama apabila berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak yang pada dasarnya memang mempunyai perbedaan.

Dimensi ekonomi pembangunan ketenagakerjaan diantaranya mencakup penyediaan para tenaga ahli dan trampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dimensi hukum pembangunan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang terlibat didalam hubungan industrial. Untuk mewujudkan hal tersebut ditetapkan berbagai kebijakan, antara lain dibidang produksi, moneter, fiskal dan upah.¹

Pengupahan merupakan bagian yang paling rawan dan paling penting di dalam hubungan industrial hubungan antara buruh dan pengusaha juga memiliki perbedaan dan bahkan sering terjadi konflik, terutama apabila berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak yang pada dasarnya memang memiliki perbedaan. Sehingga perlu adanya campurtangan dari pemerintah, Di dalam bidang hukum perburuhan yang menyangkut hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, pemerintah telah ikut campur tangan terhadap isi perjanjian yang dibuat pengusaha dengan pekerja/buruh diantaranya mengenai penetapan upah minimum, maksudnya adalah semua pengusaha dilarang membayar upah kepada pekerja/ buruh dibawah ketentuan dari upah minimum. Wujud pelaksanaan campurtangan pemerintah disini pemerintah pusat itu memberi wewenang kepada pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.² Dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan berapa besaran upah minimum regional di daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota guna

¹Saprudin, *Sosialisering Process Hukum Perburuhan dalam Aspek Kebijakan Pengupahan*, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, hal 5.

²Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 254.

melindungi hak-hak buruh dan juga untuk mewujudkan kesejahteraan buruh/pekerja yang memiliki posisi tawar rendah.³

Pada kenyataannya masih banyak buruh yang memperoleh upah dibawah ketentuan upah minimum regional dimana fenomena tersebut banyak terdapat didaerah. Masalah tersebut juga dialami oleh para buruh di Kota Kediri, dimana masih banyak pengusaha yang tidak mampu membayar para buruhnya sesuai dengan ketentuan upah minimum kota yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur. Hasil wawancara antara penulis dengan pegawai dinas sosial dan tenaga kerja kota kerdiri, menyebutkan masih terdapat 60% perusahaan di Kota Kediri yang belum mampu membayar para buruhnya sesuai dengan ketentuan upah minimum kota (UMK). Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat didalam pasal 90 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan menyatakan “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa peran pemerintah Kota Kediri terhadap pelaksanaan upah minimum regional bagi usaha kecil dan menengah belum maksimal ?
2. Bagaimana upaya hukum usaha kecil dan menengah yang tidak mampu melaksanakan kebijakan upah minimum regional ?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Kediri terhadap usaha kecil dan menengah yang tidak mampu melaksanakan kebijakan upah minimum regional ?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian diatas jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁵ Jenis penelitian ini dipilih oleh peneliti karena mempunyai tujuan untuk memahami Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan Upah Minimum Regional Bagi Usaha Kecil dan Menengah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan interdisipliner yang

³³Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan (1), Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal 180.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279

⁵Imam Koeswahyono Dkk, Sosio **Legal Pengantar Dan Substansi Pendalaman**, Intimedia, Malang, 2013, hlm 109

menggunakan konsep dan teori dari berbagai ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum, yang tidak terisolasi dan konteks-konteks sosial politik, ekonomi, budaya dimana hukum itu berada.⁶ Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian tentang data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dilapangan.⁷ Jenis Data Primer dalam penelitian ini adalah pengalaman dari subyek penelitian yaitu informan dari pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri dan beberapa pihak yang bersangkutan seperti, pekerja/buruh, pengusaha, dan serikat buruh yang dimana hal tersebut berkaitan dengan penelitian memahami Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan Upah Minimum Regional Bagi Usaha Kecil dan Menengah.⁸

Teknik memperoleh Data primer dilakukan dengan wawancara karena selama ini dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer dilapangan. Dianggap paling efektif karena wawancara dapat betatap muka secara langsung dengan responden Seorang peneliti yang sedang melakukan wawancara harus memperhatikan beberapa hal antara lain : persiapan wawancara, pelaksanaan wawancara, dan pencatatan hasil wawancara.⁹ Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala bidang perlindungan tenaga kerja, kepala seksi pengawasan ketenaga kerjaan dan kepala seksi hubungan industrial , pekerja/buruh, pengusaha, dan serikat buruh. Selain itu juga melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian agar data yang diperoleh lebih akurat yaitu dengan metode perolehan data yang mencatat dan memanfaatkan data.¹⁰ Studi kepustakaan dan dokumentasi diperoleh peneliti melalui sumber pustaka, arsip Dinsosnaker, peraturan perundang-undangan dan melakukan penelusuran internet. Seluruh studi kepustakaan dan dokumentasi harus berhubungan dengan tema penelitian.

⁶*Ibid.*, hlm. 17

⁷ *Ibid.*, hlm. 110

⁸Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah** , Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hal 10.

⁹ Suratman Dkk, **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan Ke Satu, Cv Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 127

¹⁰ Imam Koeswahyono Dkk, *Op.Cit.* hlm 112

D. Pembahasan

1. Peran Pemerintah Kota Kediri Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Regional Bagi Usaha Kecil Dan Menengah Belum Maksimal

Kebijakan upah minimum regional (UMR) merupakan kebijakan yang wajib ditaati oleh setiap perusahaan di Indonesia, termasuk semua perusahaan di Kota Kediri. Besarnya upah minimum disetiap daerah berbeda-beda tergantung sumber daya manusia, potensi dan kemajuan ekonomi daerah serta daya saing suatu daerah dengan daerah lain. Kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan kebijakan upah minimum regional berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan pasal 90 ayat (1).¹¹

Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Hal ini termasuk kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota. Kewenangan daerah kabupaten dan kota mencakup, semua kewenangan pemerintahan, selain kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lain, dengan demikian kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota sangat luas. Dengan kewenangan yang demikian luasnya diperlukan kajian khusus ini penting agar semua pemerintah daerah kabupaten dan daerah kota pemerintah daerah kabupaten dan Kotamadya melaksanakan kewajibannya.¹² Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah pada pasal 9 ayat 3 dinyatakan Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Selanjutnya pada pasal 12 UU Pemerintah Daerah ayat 2 dinyatakan bahwa salah satu urusan konkuren pemerintah daerah adalah berkenaan dengan ketenagakerjaan.¹³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

¹¹Zaeni Asyhadie, **Hukum Kerja**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal39

¹²Sri Soemantri M, **Otonomi Daerah**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, Hal 26.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587

pemerintahan, dan berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah mempunyai fungsi utama membuat pengaturan agar hubungan antara buruh dengan pengusaha berjalan serasi dan seimbang yang dilandasi oleh pengaturan hak dan kewajiban secara adil serta berfungsi sebagai penegak hukum. Disamping itu pemerintah juga berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan yang terjadi secara adil. Pada dasarnya pemerintah juga berperan dalam menjaga kelangsungan proses produksi demi kepentingan yang lebih luas.¹⁴

Peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri yang selanjutnya disebut Dinsosnaker dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan upah minimum berdasarkan adanya penetapan upah minimum regional yang sudah disahkan oleh Gubernur Jawa Timur kemudian disosialisasikan keseluruh perusahaan diwilayah Kota Kediri.¹⁵ Peran Dinsosnaker dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan upah minimum juga berdasarkan adanya surat wajib lapor perusahaan, dimana didalamnya berisi kodefikasi perusahaan, keadaan perusahaan, Keadaan ketenaga kerjaan, dan pengesahan. Setiap laporan yang dikumpulkan oleh semua perusahaan yang berada di wilayah Kota Kediri yang nantinya akan menjadi dasar dari bidang pengawasan untuk mengambil tindakan guna melindungi tenaga kerja sesuai dengan fungsinya yaitu melakukan pengawasan norma ketenaga kerjaan yang berkenaan dengan pengupahan.¹⁶ Upaya selanjutnya yaitu dengan melaksanakan monitoring dan pengawasan secara rutin dengan cara terjun langsung kesetiap perusahaan dengan memeriksa berkas-berkas yang ada dan juga dengan melakukan wawancara baik dengan pemilik perusahaan ataupun dengan para buruh guna mengetahui keadaan yang sesungguhnya apakah sudah sesuai dengan dokumen wajib lapor perusahaan yang diserahkan kepada pegawai bagian pengawas Dinas Tenaga Kerja. Upaya

¹⁴Budiyono, **Penetapan Upah Minimum dalam Kaitanya dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan**, Tesis, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007, hal2.

¹⁵Hasil wawancara dengan kepala seksi Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri pada tanggal 20 Oktober 2014(pukul 10.00. WIB).

¹⁶Hasil wawancara dengan kepala seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri pada tanggal 25 Oktober 2014 (pukul 09.00. WIB).

terakhir yang ditempuh yaitu dengan penindakan sesuai peraturan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan.¹⁷

Keutamaan yang dapat diambil dari adanya pengawasan ini adalah pengusaha menjadi tunduk dan taat kepada peraturan perundang-undangan, sehingga tercapainya produktivitas yang tinggi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.¹⁸ Peraturan perundang-undang di bidang ketenagakerjaan hanya akan melindungi buruh buruh secara yuridis dan tidak akan mempunyai arti bila dalam pelaksanaannya tidak diawasi oleh seorang ahli yang harus mengunjungi tempat kerja pekerja/buruh pada waktu-waktu tertentu. Ada tiga tugas pokok pengawas ketenagakerjaan adalah :

- 1 Melihat dengan jalan memeriksa dan menyelidiki sendiri apakah ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan sudah dilaksanakan, dan jika tidak, mengambil tindakan-tindakan yang wajar untuk menjamin pelaksanaannya;
- 2 Membantu baik pekerja atau buruh maupun pengusaha dengan jalan memberi penjelasan-penjelasan teknik dan nasehat yang mereka perlukan agar mereka memahami apakah yang dimintakan peraturan dan bagai manakah melaksanakannya;
- 3 Menyelidiki keadaan ketenagakerjaan dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan peraturan perundangan ketenagakerjaan dan penetapan pemerintah.¹⁹

Peran pemerintah daerah memang tidak mudah dalam melaksanakan kebijakan upah minimum regional, karena terdapat beberapa kepentingan antara tiga pihak yaitu pihak pemerintah yang mempunyai kepentingan untuk mengatur daerahnya, pihak buruh yang mempunyai kepentingan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan pengusaha yang mempunyai kepentingan untuk mempertahankan usahanya dan mencari laba sebesar-besarnya. Dari ketiga pihak tersebut sering terjadi ketidak harmonisan dan sulit untuk di seimbangkan, untuk itu dibutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah dan serikat pekerja, dan harus berusaha selalu menjalin komunikasi yang baik, ketegasan dari pemerintah guna menyeimbangkan

¹⁷Hasil wawancara dengan kepala bidang Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri pada tanggal 11 Pebruari 2015 (pukul 09.00. WIB).

¹⁸Zeini Asyhadie, Zainal Asikin, **Dasar Dasar Hukum Perburuhan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 63.

¹⁹*Op.cit.* hal49

kepentingan dari masing-masing pihak. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinsosnaker dalam menjalankan perannya dalam pelaksanaan kebijakan upah minimum, kendala tersebut antara lain:

1. Pengaturan tentang upah minimum regional (UMR) tidak diatur secara persektor dari jenis usaha yang dijalankan;
2. Masih kurang memadainya jumlah personil di lembaga pengawas dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada di Kota Kediri;
3. Masih terjadi ketumpang tindihan tugas antara Dinas satu dengan Dinas yang lain;
4. Masih kurangnya respon dari perusahaan untuk mentaati peraturan yang ada;
5. Iklim investasi di Kota Kediri masih belum stabil; dan
6. Masih rendahnya daya beli masyarakat.²⁰

Kebijakan upah minimum regional wajib diterapkan oleh semua pengusaha, karena sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya tidak bisa lepas dari peran pemerintah daerah, namun sampai sekarang peran pemerintah daerah Kota Kediri belum maksimal. Masih banyak pengusaha yang belum mampu melaksanakan kebijakan upah minimum namun pemerintah belum bisa melaksanakan monitoring, pengawasan, sosialisasi, dan pembinaan setiap pengusaha. Pemerintah masih belum menunjukkan keseriusanya dalam melaksanakan kebijakan upah minimum regional. Hal itu terlihat dari tindakan pemerintah belum tegas dalam penegakan hukum, selama ini pemerintah hanya memberi peringatan tapi belum ada tindakan yang tegas terhadap pengusaha di Kota Kediri yang belum melaksanakan upah minimum, seharusnya setelah ada peringatan sebanyak tiga kali tetapi tetap melanggar usahanya akan ditutup atau dengan kata lain izin usaha dicabut.²¹

2. Upaya Hukum Usaha Kecil Dan Menengah Yang Tidak Mampu Melaksanakan Kebijakan Upah Minimum Regional.

Pasal 88 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa untuk menyebutkan penghasilan yang memenuhi pengidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja. Kebijakan pengupahan tersebut antara lain

²⁰Hasil wawancara dengan kepala bidang Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri pada tanggal 11 Pebruari 2015 (pukul 09.00. WIB).

²¹Hsil wawancara dengan serikat buruh pada tanggal 28 Februari 2015 (pukul 18.30 WIB)

dengan menetapkan upah minimum. Dalam pasal 89 dijelaskan bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam penetapan upah minimum regional dicapai secara bertahap. Pemerintah dalam menetapkan upah minimum tersebut yaitu dengan memperhatikan produktifitas, pertumbuhan ekonomi serta memperhatikan usaha-usaha yang paling tidak mampu (*marginal*)²²

Kebijakan upah minimum regional bagi para pengusaha dirasa sangat memberatkan karena dengan penghasilan yang sedikit pengusaha dituntut untuk membayar upah yang relatif tinggi. Pengusaha dalam kegiatan usahanya pengusaha hanya mengambil keuntungan tidak lebih dari 10% untuk setiap jenis barang, sehingga pengusaha kesulitan dalam melaksanakan kebijakan upah minimum regional.²³ Di sisi lain kesejahteraan para buruh harus diperhatikan. Karena sebagian besar penduduk negara adalah para buruh. Upah minimum juga merupakan sumber perdebatan politik pendukung upah minimum yang lebih tinggi memandang sebagai sarana meningkatkan pendapatan.

Pemerintah dalam membuat kebijakan tidak semata-mata untuk memberatkan rakyatnya, tetapi untuk mensejahterakan rakyatnya. Penerapan upah minimum juga tidak semata-mata diterapkan langsung sepenuhnya oleh Dinsosnaker tetapi ada komponen yang juga mentoleransi bagi pengusaha yang benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan kebijakan upah minimum. Dinsosnaker memberikan toleransi kepada perusahaan yang merasa keberatan terhadap berlakunya kebijakan upah minimum regional dengan cara mengajukan penangguhan paling lambat tiga bulan setelah disahkan oleh Gubernur.

Proses penangguhan pelaksanaan kebijakan upah minimum regional bagi pengusaha yang benar-benar tidak mampu melaksanakannya yang dihimbau oleh Dinsosnaker, yaitu dengan mengajukan surat penangguhan maksimal tiga bulan setelah disahkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur mengenai besaran upah minimum regional Kota maupun Kabupaten dan setelah disosialisasikan oleh Dinsosnaker. Surat penangguhan pelaksanaan kebijakan upah minimum diserahkan kepada pegawai Dinsosnaker kemudian *diverifikasi* oleh pegawai Dinas selanjutnya usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan kepada Gubernur Jawa Timur guna mendapatkan penetapan penangguhan pelaksanaan upah minimum regional.²⁴

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279

²³Hasil wawancara dengan pengusaha pada tanggal 25 April 2015 (pukul 11.00 WIB)

²⁴Hasil wawancara dengan kepala seksi Pengawasan Ketenaga kerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri pada tanggal 12 Pebruari 2015 (pukul 09.00. WIB).

Bagi pengusaha pelaksanaan upah minimum regional memberatkan mereka tetapi mereka juga sadar bahwa upah yang diberikan kepada setiap buruh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Pengusaha juga merasa kasihan namun bagaimana lagi dengan minimnya laba hasil usahanya sehingga tidak bisa memberi upah lebih. Sebagian pengusaha memberi uang lebih kepada buruhnya apabila usahanya sedang banyak pembeli, atau memberikan uang bensin bagi buruh yang mempunyai tempat tinggal yang jauh dari tempat kerja. Demikian itu bentuk kepedulian pengusaha kepada buruhnya karena tidak bisa melaksanakan upah minimum regional.²⁵

Suwarto menyatakan bahwa kemampuan perusahaan menjadi penentu utama dalam menetapkan tingkat upah. Ada sementara pendapat yang menyatakan bahwa apabila perusahaan tidak mampu membayar upah secara wajar, maka perusahaan yang bersangkutan seharusnya menutup usahanya. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa apabila perusahaan tidak mampu, maka diberi kesempatan untuk meningkatkan efisiensi sehingga pada saatnya perusahaan yang bersangkutan mampu membayar upah secara wajar.²⁶

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pelaksanaan kebijakan upah minimum regional memang dapat ditanggguhkan, tetapi kenyataannya masih banyak pengusaha yang tidak melakukan prosedur penangguhan. Kadaan sedemikian ini terjadi dikarenakan Dinsosnaker tidak melakukan sosialisasi secara merata di seluruh wilayah Kota Kediri, selain itu hubungan antara pengusaha dan pemerintah kurang baik, sehingga pengusaha tidak mengetahui mekanisme penangguhan pelaksanaan kebijakan upah minimum regional. Bagi pengusaha yang mengerti prosedur penangguhan kebijakan upah minimum regional juga ada enggan membuat karena mereka merasa takut kalau nantinya usahanya akan dipersulit, karena prinsip usaha bagi pengusaha kecil dan menengah adalah bertahan agar usahanya tetap berjalan, dan mencari laba sedapatnya, yang terpenting terhindar dari kerugian. Sehingga pengusaha sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan termasuk dalam menanggapi permintaan, buruhnya maupun dari pemerintah apalagi berkaitan dengan hal pengupahan.²⁷

²⁵Hsil wawancara dengan pengusaha pada tanggal 23 April 2015 (pukul 12.30 WIB).

²⁶Suwarto, **Hubungan Industrial dalam Praktek**, Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, 2003 hal 190.

²⁷*ibid*

3. Kebijakan Pemerintah Kota Kediri Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah Yang Tidak Mampu Melaksanakan Kebijakan Upah Minimum.

Peran pemerintah dalam hal ketengakerjaan tampak jelas dari segi pelaksanaan kebijakan dan fungsi pengawasan, fungsi pengawasan yang menjadi kewajiban Dinsosnaker dapat diartikan sebagai, keseluruhan proses kegiatan menilai terhadap objek pemeriksaan dengan tujuan agar perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan fungsinya dan berhasil mencapai tujuannyayang telah ditetapkan, fungsi pengawasan diartikan pelaksanaan tugas umum dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebijakan pemerintah dapat mencapai sasaran yang ditetapkan secara tepat guna, hasil guna, dan berdaya guna. Adapun fungsi pengawasan adalah mencegah terjadinya kebocoran dan menekan adanya pemborosan memperlancar pelaksanaan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.²⁸

Pasal 88 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa untuk menyebutkan penghasilan yang memenuhi pengidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja. Kebijakan pengupahan tersebut antara lain dengan menetapkan upah minimum. Dalam pasal 89 dijelaskan bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam penetapan upah minimum regional dicapai secara bertahap. Pemerintah dalam menetapkan upah minimum tersebut yaitu dengan memperhatikan produktifitas, pertumbuhan ekonomi serta memperhatikan usaha-usaha yang paling tidak mampu (*marginal*)²⁹

Berdasarkan surat wajib lapor perusahaan yang telah di pelajari oleh pegawai pengawas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja maka akan diketahui perusahaan mana yang sudah mampu membayar upah pekerja sesuai dengan ketentuan pemerintah berupa upah minimum regional. Tindakan yang dilakukan oleh Dinsosnaker diawali dari adanya penetapan upah minimum regional yang sudah disahkan oleh Gubernur Jawa Timur baru kemudian disosialisasikan ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kota Kediri agar semua mengetahui dan melaksanakannya dan disuruh membuat surat wajib lapor perusahaan.

Bagi perusahaan yang belum mampu membayar tenaga kerjanya sesuai upah minimum regional maka pegawai Dinas akan memberikan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan upah minimum regional sesuai ketentuan perundang-undangan guna terciptanya masyarakat yang

²⁸Hari Sabarno, **Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal47.
Sri Soemantri M, *Op. Cit.* hal 41

kondusif dan sejahtera. Terhadap perusahaan agar perusahaan mampu berkembang sehingga nantinya mampu melaksanakan upah minimum.³⁰

Di Kota Kediri masih banyak perusahaan yang tidak mampu untuk membayar pekerjaanya sesuai dengan upah minimum regional hal tersebut dilatar belakangi karena minimnya penghasilan dari perusahaan, khususnya perusahaan menengah kebawah yang masih banyak di Kota Kediri. Sehingga pegawai Dinas Tenaga Kerja mengalami dilema karena apabila perusahaan di tuntutan untuk membayar para pekerja sesuai dengan upah minimum regional, dan memberi sanksi secara tegas sesuai dengan peraturan yang ada maka yang terjadi bukan kesejahteraan para perkerja yang didapat tetapi yang ada adalah pengangguran di Kota Kediri meningkat karena banyaknya pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja PHK akibat menuntut kenaikan upah.³¹

Sementara itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnaker) melalui Pegawai Pengawasnya juga tidak mampu berbuat banyak untuk menerapkan ketentuan bahwa Upah Minimum sebenarnya hanya diperuntukkan bagi pekerja/buruh lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Hal ini karena alasan kemampuan perusahaan yang disampaikan oleh para Pengusaha.

Dengan alasan kemampuan perusahaan tersebut terdapat duakemungkinan yaitu para pekerja/buruh tetap dapat bekerja atau perusahaan harus tutup karena tidak mampu memberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku. Alasan penutupan perusahaan dikarenakan tidak mampu memberikan upah sesuai Upah Minimum membuat Pegawai Pengawas Dinsosnaker tidak dapat berbuat banyak. solusi yang diambil biasanya lebih baik para pekerja tetap dapat bekerja meskipun dengan Upah Minimum saja daripada harus terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kebijakan upah minimum regional Pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga melakukan suatu upaya negosiasi antara pengusaha dan pekerja, yang didalamnya akan dibuat kesepakatan antara perusahaan dan buruh berkenaan dengan pengupahan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, tidak jarang ada perusahaan yang meskipun tidak mampu membayar upah buruh sesuai upah minimum regional yang telah ada,

³⁰Hasil wawancara dengan kepala seksi Pengawasan Ketenaga kerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri pada tanggal 12 Pebruari 2015 (pukul 09.00. WIB).

³¹Hasil wawancara dengan kepala seksi Pengawasan Ketenagkerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri pada tanggal 25 Oktober 2014 (pukul 09.00. WIB).

untuk menyesuaikan pemberian upah sesuai dengan upah minimum regional dengan memberi uang tambahan yaang berupa uang makan, uang jalan dll. Dengan diberikan upah tambahan tersebut maka upah yang diterima buruh setidaknya mendekati upah minimum regional Kota Kediri yaitu sebesar satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hudupnya.³²

Suatu syarat penting adalah pekerja/buruh “merasa” bahwa sistem itu sudah adil. Hal ini lebih besar kemungkinannya untuk dicapai jika pekerja/buruh terlibat dalam penyusunannya dan ikut menjalankannya. Suatu pesan yang penting disampaikan ketika memulai program penilaian pekerjaan ialah bahwa proses itu mengenai didapatkannya suatu gambaran obyektif tentang nilai relatif pekerjaan bagi perusahaan. Tidak boleh dikacaukan oleh penaksiran prestasi masing-masing pemegang pekerjaan; yang harus dilakukan dengan peninjauan prestasidan struktur gaji yang direncanakan untuk mencakup golongan-golongan yang memungkinkan kenaikan karena prestasi.

E. Penutup

Berdasar pada hasil penelitian dan pembahasan teadap data yang diperoleh dari Dinas Sosial dan Tenga Kerja Kota Kediri, pengusaha, buruh, dan serikat buruh yang ada di Kota Kediri yang dilakukan penulis, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. peran Pemerintah Daerah Kota Kediri belum maksimal karena masih banyak terdapat pengusaha yang tidak melaksanakan kebijakan upah minimum, hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah belum bisa melaksanakan sosialisasi, monitoring, dan pengawasan secara merata di seluruh perusahaan pengawasan dilakukan selama tiga bulan sekali, kurang tegasnya pemerinth daerah dalam penegakan hukum.
2. bagi pengusaha yang tidak mampu meaksanakan kebijakan upah minimum regional yaitu dengan membuat surat penangguhan pelaksanaan kebijakan upah minimum regional bagi pengusaha yang memang tidak mampu untuk memberi upah buruhnya sesuai dengan kebijakan upah minimum.
3. Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah terhadap perusahaan yang tidak mampu melaksanakan upah minimum mengambil tindakan dengan melakukan suatu upaya

³²*ibid*

negosiasi antara pengusaha dan pekerja, yang didalamnya akan dibuat kesepakatan antara perusahaan dan buruh berkenaan dengan besarnya upah yang diterima buruh sehingga tidak ada buruh yang merasa dirugikan.

Saran

1. Dinsosnaker harus bekerja keras dan melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap semua pengusaha yang terdapat di Kota Kediri, selain itu Dinsosnaker harus menjaga hubungan baik dengan para pengusaha dan buruh, wajib melakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena kebijakan dibuat untuk mengatur masyarakat sehingga menjadi lebih baik.
2. Pihak pengusaha harus lebih aktif dalam menyikapi kebijakan yang dibuat pemerintah dengan menjalankannya dan mengikuti prosedur yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan.

F. Daftar Pustaka

Buku

Budi Sutrisno, H.zaini Asyhadie, **Hukum Perusahaan & Kepailitan**, Erlangga, Jakarta, 2012.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah** , Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

Hari Sabarno, **Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Imam Koeswahyono Dkk, Sosio **Legal Pengantar Dan Substansi Pendalaman**, Intimedia, Malang, 2013.

Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan (1), Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Sri Soemantri M, **Otonmi Daerah**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.

Suratman Dkk, **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan Ke Satu, Cv Alfabeta, Bandung, 2013.

Suwarto, **Hubungan Industrial dalam Praktek**, Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, 2003.

Titik Triwulan Tutik, **Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Zaeni Asyhadie, **Hukum Kerja**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

....., **Dasar Dasar Hukum Perburuhan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Jurnal

Saprudin, *Sosialisering Process Hukum Perburuhan dalam Aspek Kebijakan Pengupahan*, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

Budiyono, **Penetapan Upah Minimum dalam Kaitanya dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan**, Tesis, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007.

Undang-Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Lembaran Negara Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3190